

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker yang dilaksanakan secara *offline* di Apotek Pahala Ketintang, dapat disimpulkan:

1. PKPA meningkatkan pemahaman calon apoteker baik dari peran, fungsi sampai tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. PKPA memberikan bekal bagi calon apoteker agar dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yang professional di bidangnya.
3. PKPA memberikan pemahaman untuk mempelajari startegi dan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan demi pengembangan pelayanan kefarmasian di apotek.
4. PKPA mewajibkan seorang apoteker berwawasan luas dan mengikuti perkembangan kesehatan agar dapat memberikan pelayanan dan juga pengobatan dengan tepat.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan setelah melaksanakan Praktek Kerja Profesi Apoteker di Apotek Pahala Ketintang yaitu:

1. Calon apoteker perlu untuk membekali diri dengan pengetahuan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan di apotek.
2. Calon apoteker perlu mengembangkan dan melatih diri dalam berkomunikasi dengan pasien.
3. Calon apoteker lebih aktif dan tanggap agar dapat memperoleh pengetahuan yang lebih banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- American Society of Health System Pharmacists, 2011. AHFS Drug Information, American Hospital formulary Service, Bethesda.
- British Medical Association. British National Formulary for Children (BNFC) 2020-2021. Royal Pharmaceutical Society, 2020.
- British Medical Association. British National Formulary (BNF) 81. Royal Pharmaceutical Society, 2021.
- Drugbank (2021). Drugbank:<https://www.drugbank.ca/>[online]. Diakses pada November 2021.
- Gunawan, S.G. 2016, *Farmakologi dan Terapi Edisi 6*, Jakarta: Badan Penerbit FKUI.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2019.
- Kementrian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Obat Rusak dan Kedaluwarsa di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rumah Tangga, 2021.
- Lacy, C. F., Lora, L. A., Morton, P. G. And Leonard, I. L., 2011, Drug Information Handbook 20th Edition, American Pharmacists Association, New York.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, 2015.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek, 2017.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan

- Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, 2021.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan, 2018.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2014.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, 2016.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, 2011.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, 2009.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 2009.
- United States Pharmacopeia, USP 42/The National Formulary, NF 37, 2019. U.S. Pharmacopeial Convention, Rockville, p.795.*